

WIDYA DHARMA adalah majalah ilmu dan pendidikan, yang diterbitkan oleh IKIP Sanata Dharma, 2 (dua) kali setahun pada bulan Oktober dan April. Majalah ini memuat tulisan-tulisan tentang ilmu, baik ilmu dasar maupun ilmu terapan dan tentang pendidikan; memuat juga laporan penelitian dan pertimbangan buku.

WIDYA DHARMA menerima sumbangan karangan dari khalayak umum, dan kepada penyumbanganya disediakan imbalan. Sumbangan karangan sudah diterima oleh Redaksi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum terbit. Redaksi berhak mengadakan perubahan untuk karangan yang dimuat sejauh tidak mengubah isinya. Karangan yang dimuat tidak selalu mencerminkan pendapat dan pandangan Redaksi.

Karangan yang dimuat tidak boleh diterjemahkan atau diperbanyak tanpa izin tertulis dari Redaksi.

DEWAN REDAKSI

Pelindung	:	Drs. A.Tutoyo, M.Sc (Rektor)
Pimpinan Umum/Penanggung Jawab/ Pimpinan Redaksi	:	Dr. A.M.Slamet Soewandi
Sekretaris Redaksi	:	Drs. Ph.Joko Pinurbo
Anggota Redaksi	:	Dr. St.Suwarsono Drs. Fr.Y.Kartika Budi, M.Pd Dr. A.Priyono Marwan Dr. J.Sudarminta Dr. J.Bismoko Drs. G.Moedjanto, M.A Dr. James J.Spillane
Administrasi	:	Aris Sukardjito

ALAMAT REDAKSI

Pusat Penelitian Sanata Dharma
Jl. Gejayan, Mrican, Tromolpos 29
Telp. (0274)3301; (0274)5352; Fac.(0274)62383
Yogyakarta 55002

WIDYA DHARMA

**Majalah Ilmu dan Pendidikan
IKIP Sanata Dharma Yogyakarta**

ISSN: 0853 - 0920

**Th. II. NO. 2
APRIL 1992**

WIDYA DHARMA
Majalah Ilmu dan Pendidikan

Tahun II. Nomor 2, April 1992

ISSN: 0853 - 0920

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
Editorial	v
1. Partisipasi Migran Sirkuler dalam Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Fisik di Desa <i>I. Gatot Triharsa</i>	1
2. Peranan Modus Representasi dalam Proses Berpikir Memahami Konsep Algoritma <i>Y. Marpaung</i>	13
3. Peran Serta Masyarakat di SD Kecil dan Model Guru Kunjung: Studi Kasus <i>Iskandar Agung dan Karmidah</i>	33
4. Teori Piaget tentang Perkembangan Kognitif Anak dan Implikasinya pada Pengajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar <i>F. Sinaradi</i>	47
5. Pancasila Ideologi Bangsa Indonesia <i>Paulus Wahana</i>	59
6. ABRI Membangun Kekuatan Politik: Sebuah Tinjauan Historis <i>Anton Haryono</i>	75
7. Linguistik Terapan dan Penerapannya <i>A.M. Slamet Soewandi</i>	85
8. Riwayat Hidup Pengarang	99

PANCASILA IDEOLOGI BANGSA INDONESIA

Paulus Wahana

Jurusan Pendidikan Penyuluhan dan Bimbingan
FIP IKIP Sanata Dharma

ABSTRAK

Artikel ini bermaksud membicarakan Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia. Sering masih terasa berkeberatan untuk menyatakan Pancasila sebagai suatu ideologi. Apakah dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi Bangsa Indonesia? Pada awalnya tulisan ini membahas mengenai pengertian ideologi, yang secara historis ternyata memiliki perkembangan dalam pengertiannya, dan berdasarkan terjadinya dapat ditemukan adanya dua jenis ideologi. Dengan melihat terbentuknya ideologi Bangsa Indonesia, dapatlah ditentukan juga jenis ideologi Bangsa Indonesia tersebut. Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia ternyata merupakan jenis ideologi yang bersifat terbuka, dan termasuk dalam pengertian yang luas. Sebagai yang memiliki ciri keterbukaan, dengan sendirinya Ideologi Pancasila menuntut juga keterbukaan dalam perwujudannya. Maka atas dasar keterbukaan tersebut, dapatlah ditemukan petunjuk bagaimana Ideologi Pancasila tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan Bangsa Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Bila kita menelusuri sejarah pemikiran tentang Pancasila, maka kita dapat menemukan berbagai kedudukan maupun fungsi Pancasila bagi kehidupan Bangsa Indonesia, misalnya: Pancasila sebagai Nilai Luhur Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia, Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia.

Menurut Kodhi dan Soejadi (1988: 58) Pancasila sejak diusulkan sampai kemudian ditetapkan dan disahkan sebagai dasar negara, pembahasannya berlangsung dalam suatu forum politik, bukan dalam forum ilmiah. Dan akhirnya memang menghasilkan kesepakatan politik untuk menemukan hal-hal yang sangat penting dan fundamental bagi dasar dan arah kehidupan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pembahasan terhadap Pancasila memang berlangsung dalam suatu forum politik, tetapi itu bukan berarti tidak ilmiah. Melihat usulan-usulan serta pembahasan-pembahasannya yang begitu mendalam, menunjukkan bahwa

pembahasannya dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diterima oleh berbagai pihak dalam keterbukaan. Pembahasan ilmiah bukan merupakan perintang, melainkan menjadi pendukung terjadinya konsensus politik yang dirasakan sebagai yang menjanjikan suatu masa depan yang lebih cerah, yang dicita-citakan dalam kehidupan bersama Bangsa Indonesia. Dengan demikian seperangkat nilai yang terkandung dalam pandangan hidup Bangsa Indonesia telah disusun secara sistematis dan selanjutnya ditetapkan serta disahkan menjadi dasar kehidupan seluruh struktur masyarakat atau Bangsa Indonesia.

Dengan tercantumnya Pancasila dalam Pembukaan UUD '45, maka terlihatlah fungsi Pancasila sebagai dasar negara, dasar yang melandasi bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Pancasila sekaligus menjadi asas Negara Republik Indonesia serta landasan bagi kehidupan Bangsa Indonesia dalam menyongsong hari depannya yang lebih baik. Dan demi tercapainya cita-cita negara proklamasi seperti tertuang dalam Pembukaan UUD' 45, dasar ini telah menjadi kesepakatan nasional yang harus ditaati dan dilaksanakan. Dengan demikian telah ditetapkanlah ideologi Bangsa Indonesia yang menegara, yaitu Ideologi Pancasila yang mengandung kadar kefilosofatan dan sekaligus bersifat praksis. Ini berarti Pancasila tidak hanya sekedar aliran filsafat, melainkan juga difungsikan sebagai ideologi negara (Kodhi dan Soejadi, 1988: 59).

Agar Pancasila sungguh-sungguh dapat berfungsi sebagai ideologi dalam kehidupan menegara Bangsa Indonesia, kita Bangsa Indonesia perlu mempelajari dan memahami ideologi tersebut. Dalam tulisan ini dapat dicarakan berbagai masalah sebagai berikut:

1. Apakah ideologi itu?
2. Apakah perbedaan pokok antara berbagai jenis ideologi yang ada?
3. Apakah jenis Ideologi Bangsa Indonesia?
4. Bagaimanakah Ideologi Bangsa Indonesia dapat diwujudkan dalam kehidupan yang nyata?

Untuk membicarakan permasalahan tersebut di atas, kita akan membahasnya secara kritis-logis dalam bagian-bagian berikut:

1. Pengertian Ideologi
2. Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup
3. Ideologi Bangsa Indonesia
4. Perwujudan Ideologi Bangsa Indonesia

Pembahasan ini tidak bermaksud menggambarkan secara deskriptik bagaimana Bangsa Indonesia memfungsikan Pancasila sebagai suatu ideologi, tetapi lebih bermaksud bagaimana seharusnya Ideologi Pancasila berperan bagi kehidupan Bangsa Indonesia. Bukan menggambarkan apa yang dilakukan, tetapi

J
I
I
t
r
s
p

g
b
k

mencari pedoman bagaimana harus dilakukan. Dengan pembahasan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai peranan Ideologi Pancasila dalam kehidupan Bangsa Indonesia.

2. PENGERTIAN IDEOLOGI

Ideologi berasal dari kata *idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan *logos* yang artinya ilmu. Secara harafiah ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. (Kodhi dan Soejadi, 1988: 49). Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita diartikan sebagai hal yang telah ditetapkan dan harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, atau faham. Pada hakekatnya cita-cita dan dasar itu merupakan satu-kesatuan: cita-cita yang mau dicapai dapat merupakan dasar atau alasan bagi usaha pencapaiannya, sedangkan dasar untuk bertindak berorientasikan pada cita-cita yang akan ditujunya. Dengan demikian ideologi merupakan pengertian yang mencakup baik cita-cita maupun dasar-dasar yang menjadi landasan pemikirannya.

Ideologi membentuk suatu sistem pemikiran yang secara normatif memberikan landasan yang dijadikan pedoman tingkah laku dalam mencapai cita-cita yang ditetapkannya. Dengan demikian ideologi tidak hanya sekedar merupakan usahanya saja, melainkan sekaligus mencakup hasil usahanya itu yang dapat dijadikan pedoman untuk bertindak dalam mencapai cita-cita. Secara formatif ideologi merupakan suatu cara pemikiran untuk mencari dasar yang dapat dipakai sebagai landasan kehidupan dalam mencapai cita-cita, dan secara substansial ideologi merupakan hasil usaha pemikiran itu sendiri.

Ideologi merupakan pemikiran tentang cita-cita yang dapat ditetapkan sebagai tujuan terakhir, dan bukan pengetahuan mengenai hal-hal yang obyektif. Ideologi memikirkan mengenai kebenaran yang diyakininya dapat dijadikan tujuan hidupnya, dan tidak sibuk memikirkan mengenai sarana-sarana dan pemecahan masalah-masalah teknis. Menurut Lanur (*Basis*, edisi Februari 1984: 43) ideologi boleh dimasukkan dalam kategori pengetahuan yang subyektif. Ideologi tidak menghasilkan pengetahuan yang secara obyektif dapat diuji dalam realitas, melainkan menghasilkan kebenaran-kebenaran yang dapat diterima dan diyakini sebagai tujuan terakhir. Namun untuk menghasilkan pemikiran itu tetap bertumpu pada realitas.

Ideologi lebih berkaitan dengan tujuan dan kepentingan dari orang atau golongan yang mendukungnya. Tujuannya lebih untuk mempertahankan kebutuhan dan kepentingan dari sistem sosial bersangkutan daripada prihatin akan kebenaran sebagai kebenarannya. Ideologi berasal dari kebutuhan sosial tertentu

dan dari sistem kepentingan golongan yang tertentu juga. Dengan demikian ideologi merupakan cara berpikir yang tidak bersifat otonom, tetapi cara berpikir yang telah diwarnai kepentingan dari golongan tertentu.

Sebagai hasil usahanya, ideologi mencakup jumlah seluruh pemikiran, gagasan, mite, simbol, makna, dan sebagainya, sebagai komponen 'mental' dalam masyarakat tertentu. Ideologi dibedakan dengan sesuatu yang nyata secara obyektif, misalnya seperti struktur sosial. Yang nyata secara obyektif itu dipertentangkan dengan gagasan-gagasan yang terdapat hanya dalam akal budi saja. Ideologi merupakan hasil seluruh kegiatan mental yang bersifat subyektif. Dan seluruh kegiatan mental ini cenderung mendukung kebenaran atau keberadaan dari suatu masyarakat tertentu.

Secara historis, istilah ideologi pertama kali dipakai pada tahun 1796 oleh Destutt de Tracy, seorang Perancis yang mempunyai cita-cita untuk membangun suatu sistem pengetahuan tentang cita-cita yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Istilah "ideologie" diartikan sebagai "science of ideas" yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. (Kelompok Studi Pancasila UNPAR, 1983: 9). Namun Napoleon mencemoohkan hal tersebut sebagai suatu khayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis, merupakan impian yang tidak akan menemukan kenyataannya. Tetapi selanjutnya konsep ideologi menjadi berkembang lagi karena pengaruh Karl Marx. Istilah ideologi menjadi vobuler yang penting di dalam pemikiran politik maupun ekonomi Karl Marx.

Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Ideologi menjadi bagian dari suprastruktur (bangunan atas) yang didirikan di atas kekuatan-kekuatan yang memiliki faktor-faktor produksi yang menentukan coraknya. Dengan demikian ideologi merupakan keseluruhan sistem ide serta gagasan-gagasan yang bersifat relatif, karena hanya mencerminkan kekuatan lapisan golongan tertentu serta semata-mata hanya benar untuk golongan tertentu saja. Pandangan Marx ini dilanjutkan oleh Neo-Marxisme dan Neo-Positivisme. Mereka berpandangan bahwa ideologi itu terbentuk karena kekuatan-kekuatan yang membentuk ideologi itu membutuhkannya untuk mempertahankan posisinya serta kekuatannya. Ideologi selalu bersifat fungsional, merupakan suatu sistem pemikiran yang diciptakan oleh suatu kekuatan untuk kepentingan kekuatan itu sendiri.

Dengan melihat usaha yang dilakukan manusia dalam perkembangan sejarah, ideologi dapat memiliki arti sebagai "science of ideas" atau weltanschauung. Dan berhubung pemikiran ini lebih ditujukan pada kepentingan, maka ideologi kurang begitu memberi perhatian pada kebenaran internal maupun ke-

nyataan empiris (Magnis Susena, 1987: 366-367). Ideologi merupakan suatu cara berpikir yang tidak berbicara mengenai kebenaran, pengetahuan, melainkan lebih berbicara mengenai keyakinan kultural, kemanfaatan, kepentingan, kemauan, serta pamrih. Ideologi lebih banyak dipandang sebagai hal yang masuk ke dalam belief system dan power system, dari pada hal yang ilmiah atau filsafati yang merupakan suatu knowledge system (Pranarka, 1983: 366-367). Ideologi memiliki sifat total, karena mengikat orang-orang yang menerima ideologi tersebut. Ideologi selalu meminta kesetiaan tegas tanpa kompromi, dan karena itu lalu mempunyai sifat dogmatik. Ideologi merupakan suatu sistem pemikiran yang power oriented, totalitarianism oriented, dogmatism oriented, serta establishment oriented. Ideologi mempunyai konotasi sebagai alat politik dari elite yang berkuasa untuk mempertahankan statusquo.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditemukan beberapa fungsi ideologi bagi suatu kelompok masyarakat atau bangsa. Dalam masyarakat yang mengalami stagnasi, dimana irama hidup mencapai pada titik jenuh, maka ideologi sering dapat menggairahkan lagi hidup kelompok masyarakat atau bangsa untuk menyongsong situasi baru yang dipromosikan. Ideologi sebagai pedoman hidup bernegara dapat mempersatukan bangsa, memberikan rumusan situasi negara di masa lampau, masa kini dan mengatur langkah-langkah strategis untuk mencapai situasi yang diidam-idamkan. Ideologi memberikan aturan permainan bagi kehidupan politik dan bermasyarakat dalam usaha bersama mencapai kesejahteraan bangsa sebagai kesatuan yang kuat. Karena selain memberikan arti pada masa lampau dan masa kini juga menunjukkan dunia baru yang akan dicapai bersama. Dengan demikian ideologi mengarahkan pikiran serta tindakan manusia kepada nilai-nilai baru yang dicita-citakannya. Ideologi merupakan pengge-rak/motivator dan pemberi arah ke nilai baru yang ingin diwujudkan bersama.

Karena ideologi berfungsi antara lain memberikan harapan akan dunia baru yang lebih baik dari keadaan masa lampau yang kurang ideal serta memberikan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan yang ideal tersebut, maka ideologi sangat menarik bagi rakyat baik secara rasional maupun secara emosional. Sering ada kecenderungan ideologi dikeramatkan, sebagai yang mampu membawa keselamatan bagi bangsa bahkan bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian ideologi diterima sebagai ajaran suci yang tidak bisa dibantah, tertutup bagi ide dan realitas baru, sehingga menjadi steril, kakū dan tidak berkembang. Dengan melihat pengaruh ideologi sedemikian besar bagi keterlibatan masyarakat, sebagai eksesnya dapat terjadi manusia dikorbankan untuk ideologi, dan bukan ideologi untuk manusia. Dan berhubung ideologi menyangkut masalah strategi bernegara, maka tidak jarang kelompok-kelompok masyarakat, menggunakan ideologi sebagai alat untuk mempertahankan dan memperoleh kepentingan diri secara sepihak dengan merugikan pihak-pihak lainnya. Dan dalam

rangka memeralat ideologi untuk mempertahankan dan memperoleh kepentingan diri secara sipihak itu sering terjadi suatu pengkhianatan terhadap ilmu dan kebenaran. Misalnya di dalam ilmu sejarah sering terjadi penggelapan kebenaran fakta historis, bahkan sering pula pemutar-balikan kenyataan demi kepentingan fihak tertentu dalam membenarkan ideologinya.

3. IDEOLOGI TERBUKA DAN IDEOLOGI TERTUTUP

Berdasarkan lingkup isinya, ideologi dapat diartikan sebagai berikut: dalam arti luas, istilah ideologi digunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar serta keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif, dan dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Ideologi dalam arti luas ini lazimnya disebut juga ideologi terbuka. Sedangkan ideologi dalam arti sempit lazimnya juga disebut ideologi tertutup, karena kemutlakannya tidak mengizinkan orang untuk mengambil jarak terhadapnya. Ideologi terbuka merupakan suatu pemikiran yang terbuka, sedangkan ideologi tertutup itu merupakan suatu sistem pemikiran tertutup.

Ideologi tertutup dapat dikenali dari beberapa ciri khas. Ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita suatu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan membarui masyarakat. Apabila kelompok orang itu berhasil untuk merebut kekuasaan politik, ideologinya itu akan dipaksakannya kepada masyarakat. Pola dan irama kehidupan, norma-norma kelakuan dan nilai-nilai masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut. Adanya ideologi tertutup mengandaikan bahwa kekuasaan secara eksklusif terletak dalam tangan elite yang melegitimasi monopolinya atas kekuasaan, dengan tuntutan bahwa mereka adalah pengemban kemurnian ideologi.

Atas nama ideologi dibenarkan adanya pengurbanan-pengurbanan yang dibebankan kepada masyarakat, masyarakat harus setia dan sedia berkorban untuk ideologi. Ideologi tertutup tidak hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak. Meskipun dimungkinkan adanya dari berbagai macam ideologi dalam suatu masyarakat, seluruh anggota masyarakat tetap memperoleh tuntutan mutlak untuk taat kepada ideologi tersebut. Itu berarti orang harus taat kepada elite yang mengembannya serta tuntutan ideologisnya.

Yang berlaku bagi ideologi tertutup tidak berlaku bagi ideologi terbuka. Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral

PANCASILA IDEOLOGI BANGSA INDONESIA

dan budaya masyarakat itu sendiri (Magnis Susena, 1987: 3371). Ideologi ini bukan merupakan keyakinan dari sekelompok orang tertentu saja, melainkan hasil musyawarah dan konsensus dari masyarakat tersebut. Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, melainkan digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Ideologi terbuka adalah milik seluruh rakyat, sehingga masyarakat akan dapat menemukan 'kepribadiannya' di dalam ideologi tersebut.

Ideologi terbuka tidak hanya sekedar dianggap benar oleh masyarakat, melainkan dibutuhkan oleh masyarakat. Agar gagasan dapat diterima oleh semakin banyak orang, maka rumusnya harus semakin tidak operasional. Dengan demikian ideologi terbuka yang dibutuhkan seluruh anggota masyarakat isinya tidak operasional. Dan ideologi itu baru menjadi operasional apabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi atau peraturan perundangan lainnya. Setiap generasi baru perlu menggali kembali dalam ideologi tersebut untuk menemukan implikasi pemikiran-pemikiran ideologis tersebut untuk dapat diwujudkan sesuai dengan situasi yang dihadapinya.

Dalam rangka membangun kerangka sistem idea yang akan dijadikan pedoman bertingkah laku tersebut, sebenarnya mereka perlu mempunyai wawasan tentang alam, masyarakat, manusia dan segala realitas yang dijumpai serta dialaminya semasa hidupnya, termasuk kesulitan dan permasalahan yang dihadapinya (Moedjanto, dkk., 1989: 91). Dalam kesadaran akan realitas kosmis inilah ia mendapatkan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan serta cita-cita yang diyakininya, sehingga mendorong timbulnya kegiatan (kerja) sebagai mediasi untuk menemukan keduanya dalam kenyataan hidup mereka sehari-hari.

Kegiatan tersebut merupakan langkah-langkah perwujudan yang harus dilakukan sesuai dengan persepsi dan orientasi yang dipunyainya sejak semula. Dengan demikian terjadilah proses penuangan orientasi serta wawasan ke dalam bentuk nilai dan asas yang normatif dan kemudian perwujudan ke dalam bidang-bidang kehidupan dan tingkah laku politik. Oleh karena itu ideologi mengandung dimensi-dimensi sebagai berikut (Kelompok Studi Pancasila UNPAR, 1983: 10):

- realitas : yaitu pemahaman situasi sosial yang sedang dihadapi sebagai produk masa lampau;
- idealisme : yaitu usaha memberi gambaran situasi sosial baru yang ingin diciptakan;
- fleksibilitas : yaitu penyusunan program umum yang kondisional dan situasional yang menggariskan langkah-langkah untuk mencapai situasi baru yang dikehendaknya.

Usaha manusia yang tak henti-hentinya melalui akal, pikiran dan pengalamannya ingin mencari serta menemukan kebenaran dan kenyataan, baik me-

ngenai dirinya sendiri maupun segala sesuatu yang dijadikan obyeknya, secara kritis, mendasar, radikal dan integral merupakan usaha untuk memperoleh suatu kesatuan pandangan tentang realitas semesta di mana manusia itu hidup, dan akhirnya akan secara lebih kritis dan jelas, manusia tersebut dapat menentukan tujuan hidupnya dan arah tingkah lakunya. Usaha tersebut akan menghasilkan suatu sistem nilai yang kebenarannya sudah diyakini sehingga dijadikan dasar atau pedoman bagi manusia tersebut dalam memandang realitas semesta, memandang apa dan bagaimana hidup ini, dan juga sebagai dasar atau pedoman bagi manusia di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Dengan demikian nampak adanya suatu proses peralihan dari kegiatan pemikiran yang bersifat abstrak menjadi suatu sistem cita-cita/keyakinan-keyakinan (*belief-system*) yang lebih bersifat praktis, karena menjadi landasan bagi cara hidup manusia atau suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupannya. Dan ini merupakan proses penjelmaan dari pemikiran filsafat menjadi ideologi (Kodhi dan Soejadi, 1988: 56).

Sebaliknya ideologi sebagai suatu sistem pemikiran (*system of thought*) yang menjalin kesatuan cita-cita yang mendasar dan menyeluruh memang perlu bersumberkan pada filsafat, yang bersifat mendasar dan nyata untuk diaktualisasikan. Nilai-nilai dasar yang lahir dari suatu pandangan atau filsafat hidup akan dijadikan norma ideal yang melandasi ideologi, karena norma itu akan dituangkan dalam perilaku, dalam kelembagaan sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan segala bidang lainnya. Jadi filsafat merupakan dasar dan sumber bagi perumusan ideologi yang juga menyangkut strategi dan doktrin, dalam menghadapi permasalahan yang timbul di dalam kehidupan bangsa dan negara.

4. IDEOLOGI BANGSA INDONESIA

Setiap bangsa, sebagai satu kesatuan kehidupan masyarakat, tentu saja baik sadar ataupun tidak sadar memiliki suatu kesatuan pandangan hidup bersama. Dengan pandangan hidup ini sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana bangsa itu memecahkan persoalan-persoalan tadi (Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, 1981: 7). Dan tanpa memiliki pandangan hidup maka sesuatu bangsa akan merasa terus terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti timbul, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Sebaliknya dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dalam pandangan hidup

PANCASILA IDEOLOGI BANGSA INDONESIA

ini terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh sesuatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Konsep dasar itu merupakan hasil pengalaman dalam perjuangan hidupnya, yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diperoleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa tersebut untuk mewujudkannya.

Demikian pula bangsa Indonesia tentu saja juga memiliki suatu pandangan hidup yang dapat menjadi dasar dan mengarahkan perkembangan hidupnya. Para pendahulu kita telah dapat merumuskan secara jelas apa sesungguhnya pandangan hidup bangsa kita, yang kemudian kita namakan Pancasila. Pancasila di sini merupakan seperangkat gagasan vital yang menggambarkan sikap atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan pada saat bangsa Indonesia akan hidup menegara, para pendiri negara berhasil menemukan pandangan hidup tersebut dan kemudian menjadikan Pancasila tersebut sebagai dasar bagi kehidupan kita sebagai bangsa yang menegara, dan secara resmi ditetapkan sebagai Dasar Negara.

Apabila kita melacak kembali kelahiran serta perkembangan Pancasila sebagai dasar negara, jelaslah bahwa proses tersebut berlangsung dalam forum politik. Di dalam forum politik itulah dikumandangkan himbauan-himbauan politik, yang pada akhirnya datang pada suatu kesepakatan politik untuk menerima hal-hal yang sangat fundamental bagi dasar dan arah kehidupan bangsa. Proses tersebut berlangsung di dalam perdebatan semenjak Juni 1945 hingga mencapai klimaksnya pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu di saat tercapainya konsensus untuk menghapus 'tujuh kata-kata' dalam merumuskan sila pertama. Semenjak itu Pancasila sebenarnya bukan lagi sekedar suatu kesepakatan politik, melainkan sudah berkembang menjadi komitmen filsafati yang mengandung konsensus transenden yang menjanjikan kesatuan dan persatuan sikap serta pandangan Bangsa Indonesia dalam menyongsong hari depan yang dicita-citakannya. Dengan demikian Pancasila bukan lagi sekedar alternatif, melainkan suatu imperatif bagi Bangsa Indonesia.

Dengan tercantumnya Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka terlihat fungsi pertama Pancasila sebagai dasar negara. Dasar yang melandasi bangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Pancasila sekaligus menjadi asas negara Republik Indonesia dan landasan serta pedoman dalam kehidupan negara bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita dan tujuannya hidup bernegara, dalam menyongsong hari depannya yang lebih baik. Dan ini telah merupakan kesepakatan nasional yang harus ditaati dan dilaksanakan demi tercapainya cita-cita negara Proklamasi seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menjadi asas, landasan dan pedoman negara Indonesia dalam mencapai cita-cita bernegara, maka Pancasila dalam hal ini merupakan ideologi bagi negara Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan konteks perkembangan ideologi di Barat, maka Pancasila haruslah dipandang sebagai 'suatu ideologi yang tidak ideologis'. Sebab suatu ideologi tentunya memiliki ciri demikian: berdasarkan suatu ajaran yang menyeluruh terhadap makna hidup dan nilai-nilai, ditentukan secara konkrit bagaimana manusia harus bertindak. Ideologi tidak hanya menuntut hal-hal yang bersifat umum, melainkan ideologi akan menuntut ketaatan konkrit, harus melakukan ini dan itu bahkan seringkali ideologi menuntut dengan mutlak orang harus bertindak dan bersikap tertentu. Dengan demikian Pancasila bukanlah suatu ideologi dalam arti seperti tersebut di atas.

Berdasarkan rumusannya Pancasila secara eksplisit memuat nilai-nilai dasar saja dan tidak memuat tuntutan-tuntutan konkrit. Dalam rumusan kelima sila dan butir-butir P4 tidak satu kalimatpun yang berbentuk imperatif: bagaimana kita menjalankan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan yang adil dan beradab dan sebagainya, melainkan kita harus mencari sendiri pelaksanaannya. Pancasila tidak harus ditafsirkan karena penafsiran akan merupakan penyempitan nilai-nilai Pancasila secara ideologis. Justru keluhuran martabat Pancasila terletak pada penghormatan pada originalitas dan otonomi manusia.

Secara hirarkis nilai Pancasila lebih luhur daripada ideologi. Pancasila merupakan suatu paradigma dari perumusan nilai-nilai, cita-cita, jiwa, kepribadian dan pandangan hidup suatu bangsa yang tidak bersifat ideologi. Pancasila merupakan norma kritik yang paling fundamental terhadap segala usaha dan kegiatan politik di Indonesia, termasuk pembangunan nasional. Pada hakekatnya Pancasila adalah kesepakatan nasional dalam usaha bersama membangun kehidupan bersama atas dasar hormat terhadap martabat manusia dengan segala dimensinya (Moedjanto, dkk., 1989: 93) Memang Pancasila menuntut, misalnya: agar pembangunan nasional sesuai dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi Pancasila tidak menuntut bentuk konkritnya. Pancasila tidak menentukan realisasi pembangunan, pertanian atau industri atau rumah sakit atau sekolah yang diprioritaskan. Pancasila hanya menuntut agar skala prioritas ditentukan demi terpeliharanya martabat manusia sebagaimana terungkap dalam Pancasila.

Ideologi Pancasila bukanlah ideologi yang bersifat totaliter dan dipaksakan untuk diterima secara buta seperti halnya ideologi Marxisme. Pancasila merupakan hasil penggalan kebudayaan dan hasil perkembangan kebudayaan Indonesia, dapat diharapkan ideologi Pancasila ini, apabila disampaikan secara sederhana, jelas dan terus-menerus baik dalam kata maupun dalam teladan, akan mampu mengetuk hati nurani setiap rakyat Indonesia. Ideologi Pancasila tetap menghormati kebebasan pribadi dan martabat manusia. Ideologi Pancasila tidak melancarkan indoktrinasi melainkan menggunakan persuasi dan dialog. Sehingga dengan demikian diharapkan ideologi Pancasila mampu berperan: membimbing

PANCASILA IDEOLOGI BANGSA INDONESIA

semua warga negara sedemikian rupa, sehingga mereka dalam usaha bersama menyelenggarakan negara ini dengan sadar dan sukarela bersedia mentaati dan melaksanakan pedoman-pedoman yang dikandung didalam kelima sila dalam Pancasila. Adanya tuntutan bentuk konkrit dalam tindakan, yang sering lebih bersifat paksaan, justru merupakan hal yang bertentangan dengan isi Ideologi Pancasila itu sendiri, sebagai yang menghormati martabat manusia.

Ideologi Pancasila bukanlah ideologi yang tertutup bagi ide baru dan realitas. Ideologi Pancasila mengakui adanya pergeseran dan perubahan nilai sebagai pertanda adanya dinamika masyarakat untuk mencapai kemajuan (Moedjanto, dkk., 1989: 93). Pergeseran dan perubahan nilai adalah wajar, hal ini membuktikan vitalitas kebudayaan masyarakat yang bersangkutan yang mampu mempertahankan identitasnya dalam peredaran dan kemajuan jaman. Pergeseran nilai dari waktu ke waktu makin cepat. Agar tetap aktual dan dapat diterima dalam kehidupan Bangsa Indonesia, Pancasila perlu dapat menerima dan menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dunia.

Namun keterbukaan ini tidak berarti diterimanya segala macam nilai apapun juga, termasuk nilai-nilai yang bertentangan dan akan menggeser nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila harus tetap dipertahankan dan menjadi acuan serta dasar bagi segala kebijaksanaan dan pelaksanaan kehidupan bangsa dan negara. Berdasarkan kenyataannya Pancasila mengandung nilai-nilai yang universal dan bahkan dipandang sebagai "ultimate values" bagi Bangsa Indonesia, maka sebaiknya usaha penyesuaiannya hanya terbatas pada nilai-nilai instrumentalnya saja, yang mendukung bagi terwujudnya nilai-nilai dasar Pancasila sebagai tujuan akhirnya. Dengan demikian nilai-nilai dasar Pancasila akan tetap mampu memberikan dasar bagi nilai-nilai yang lebih konkret bagi kelompok-kelompok yang ada dalam perjalanan hidup Bangsa Indonesia. Keterbukaan Ideologi Pancasila tidak berlaku bagi nilai-nilai dasar Pancasila, melainkan terbuka untuk nilai-nilai instrumentalnya saja, yang memiliki fleksibilitas untuk memelihara relevansinya bagi perkembangan Bangsa Indonesia dari masa ke masa (BP-7 Propinsi DIY, 9).

Ideologi Pancasila adalah suatu system of thought yang terbuka baik secara historis, sosiologis, maupun kultural (Kodhi dan Soejadi, 1988: 69) Kalau pun ada komitmen yang sifatnya total, hal itu bukanlah karena ideologi Pancasila adalah sebuah ideologi tertutup yang bersifat totaliter, melainkan karena rakyat Indonesia sendirilah yang memberikan komitmen seperti itu melalui kesepakatan-kesepakatan nasional, karena di dalamnya mereka menemukan dirinya sendiri, yaitu jiwa bangsa, kepribadian bangsa dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Berdasarkan asal-usulnya Ideologi Pancasila lahir dan terjadi dari suatu perjuangan yang mencita-citakan kemerdekaan, persatuan, solidaritas, kemajuan,

kecerdasan, demokrasi dan kebudayaan, yang kesemuanya itu telah dituangkan ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai piagam dasarnya perjuangan kebangsaan Indonesia, piagam konstitusional negara Indonesia serta piagam kulturalnya masyarakat dan bangsa Indonesia. Di dalam dasar-dasar itulah bangsa Indonesia ingin membangun kehidupan kebangsaan yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur, maju, sejahtera lahir dan batin. Bahkan ideologi Pancasila memandang bangsa Indonesia sebagai bagian dari cita-cita perjuangan kemanusiaan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ideologi Pancasila jelas bukan hanya berasal dan disetujui oleh salah satu golongan dalam masyarakat Indonesia, melainkan merupakan suatu ideologi yang digali serta disetujui oleh seluruh Bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila bukan merupakan ideologi demi kepentingan suatu golongan tertentu saja, melainkan suatu ideologi demi kepentingan seluruh Bangsa Indonesia dalam menyongsong masa depan yang dicita-citakan bersama.

Ideologi Pancasila sebagai *system of thought* adalah sesuatu yang sifatnya historis, artinya terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, tumbuh dan berkembang di dalam sejarah itu pula. Karena itu ideologi Pancasila sebagai *system of thought* juga bersifat evolutif, artinya mengakui perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan. Juga mempunyai sifat dialektikal, artinya ia terjadi karena ada masalah-masalah, dan tumbuh juga karena ada masalah-masalah. Identitas ideologi Pancasila semakin nyata dan jelas di dalam interaksinya dengan masalah-masalah dan wawasan-wawasan yang berbeda dari ideologi Pancasila tersebut. Ia juga bersifat dialogal, artinya ideologi Pancasila bukanlah wawasan yang menolak interaksi dan komunikasi dengan sistem pemikiran lain. Dengan demikian nampak jelas bahwa ideologi Pancasila mempunyai wawasan ke depan, karena ia adalah ideologi perjuangan, ideologi pergerakan, dengan cita-cita yang ingin dikejar dan diwujudkan.

Ideologi Pancasila mencita-citakan kemerdekaan, persatuan dan kesatuan, kebersamaan, solidaritas, demokrasi dan kebudayaan. Oleh karena itu ideologi Pancasila tidak mengajarkan dogmatisme, eksklusivisme, totalitarianisme. Ia juga bukan ideologi yang menjadi milik atau monopoli satu golongan saja, tetapi merupakan milik dari seluruh golongan yang ada di Indonesia (keterbukaan sosialogis). Ia dapat diopersonalisasikan secara terus-menerus dalam menghadapi tantangan sejarah (keterbukaan historis). Ia juga memiliki keterbukaan kultural sebagai manifestasi dari keterbukaan yang inheren pada hidup dan kehidupan manusia. Ia tidak tertutup bagi ide-ide dan realitas baru.

5. PERWUJUDAN IDEOLOGI PANCASILA

Penekanan ideologi tidaklah terdapat pada kebenaran-kebenaran intelektual, melainkan lebih pada keyakinan serta kemanfaatan praktikal. Meskipun di

PANCASILA IDEOLOGI BANGSA INDONESIA

dalam ideologi tercakup elemen kognitif intelektual manusia, namun di dalamnya juga termuat nilai-nilai sebagai cita-cita yang menuntut manusia bersangkutan untuk mengusahakannya. Dalam hubungannya dengan manusia, bangsa dan negara, ideologi berarti sebagai suatu sistem cita-cita dan keyakinan-keyakinan yang mencakup nilai-nilai dasar, yang dijadikan landasan bagi cara hidup suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupannya. Ideologi Pancasila, yang memuat nilai-nilai dasar serta cita-cita luhur Bangsa Indonesia, dengan sendirinya menuntut Bangsa Indonesia untuk mewujudkannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga nilai-nilai yang merupakan cita-cita Bangsa Indonesia itu terwujud dalam realitas kehidupannya.

Untuk mewujudkan ideologi Pancasila itu, kita harus tetap memperhatikan awal terbentuknya dan ditetapkannya Ideologi Pancasila tersebut. Ideologi Pancasila merupakan ideologi dari seluruh Bangsa Indonesia dan diperuntukkan bagi seluruh Bangsa Indonesia, dan bukan ideologi dari seseorang atau sekelompok kecil Bangsa Indonesia yang diperuntukkan bagi seluruh Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang menyadari akan nilai-nilai yang dimilikinya, selanjutnya menuangkannya ke dalam konsep teoritik tentang cita-cita dan keyakinan-keyakinan yang menjadi landasan bagi kehidupan bersama Bangsa Indonesia dalam menegara. Pancasila yang merupakan falsafah dan pandangan hidup Bangsa Indonesia secara operasional dijadikan ideologi Bangsa Indonesia. Pancasila merupakan konsensus politik yang menjanjikan suatu komitmen untuk bersatu dalam sikap dan pandangan dalam menuju hari depan Bangsa Indonesia yang lebih cerah, yang dicita-citakan bersama.

Yang dijadikan cita-cita bersama itu tentu saja bukan hanya pada saat dipikirkan serta dirumuskannya, tetapi juga tetap diharapkan pada saat pelaksanaannya. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama mewajibkan Bangsa Indonesia mewujudkannya serta menghindari hal-hal serta tindakan-tindakan yang tidak sesuai serta bertentangan dengan nilai-nilai dasar tersebut. Meskipun perwujudan nilai-nilai itu dapat menjadi berbagai macam kemungkinan, namun bentuk-bentuk perwujudannya tetap harus mengacu pada nilai-nilai dasar serta dapat diterima dan disepakati oleh Bangsa Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi yang nyata. Disamping nilai dasar harus disepakati, bentuk perwujudan nilainya juga harus dapat diterima dan disepakati bersama. Dalam perwujudannya perlu adanya kesepakatan bersama, sehingga pelaksanaannya memang dikehendaki bersama dan demi kepentingan bersama. Ada satu syarat yang harus dipenuhi dalam penjabaran nilai-nilai instrumental ialah dimufakati seluruh bangsa (BP-7 Propinsi DIY, 10).

Mengingat Ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka, Ideologi Pancasila tentu saja memiliki keterbukaan dan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Ideologi Pancasila juga bukan ideologi yang menjadi milik atau monopoli satu

golongan saja, tetapi merupakan milik seluruh golongan yang ada di Indonesia. Dengan demikian Ideologi Pancasila harus dapat diterima seluruh golongan yang ada di Indonesia dalam pelaksanaannya juga. Ideologi Pancasila dapat diterima dan diwujudkan oleh berbagai macam golongan yang ada di Indonesia berdasarkan situasi dan kondisi bersangkutan. Janganlah sampai terjadi Ideologi Pancasila dipakai untuk melindungi kepentingan golongan tertentu saja, serta untuk menindas golongan lainnya.

Pancasila sebagai ideologi negara tentunya mampu memberikan orientasi, wawasan, asas dan pedoman normatif dalam seluruh bidang kehidupan negara. Nilai-nilai Pancasila harus dituangkan kedalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan hankam, dengan demikian nampak kemana sistem penyelenggaraan negara harus diwujudkan. Dan sebagai konsekwensi dari fungsi ideologi, sekarang diharapkan terungkapnya sistem ekonomi Pancasila, sistem politik Pancasila yang dimanifestasikan dalam bentuk negara, sistem pemerintahannya, kehidupan hukum serta perundangan, dan lain-lainnya. Dengan demikian ideologi Pancasila memiliki dasar yang mendukung dalam realitas kehidupan, sehingga perwujudannya lebih dimungkinkan, dan tidak hanya sekedar utopia, sebagai gagasan yang tak ada dasar perealisasiannya dalam kehidupan (Mannheim, 1991: 214). Dengan terbentuknya sistem kehidupan tersebut, diharapkan penyimpangan-penyimpangan lebih mudah dipantau, yang akhirnya dapat segera diluruskan.

Sebagai dasar filsafat negara yang telah diterima seluruh Bangsa Indonesia dalam sepanjang sejarahnya, rumusan dan isi Pancasila tentu saja bersifat umum. Dan menurut pembahasan Bapak Notonagoro (1987: 29-34) sebagai dasar filsafat negara, Pancasila ternyata mempunyai isi dan arti yang abstrak, umum, universal, dan tetap tidak berubah. Hal ini justru memungkinkan Pancasila dapat merupakan sumber yang tak terhingga dalam, luas dan kayanya bagiperkembangan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia. Namun untuk pelaksanaannya, rumusan yang abstrak-umum-universal ini perlu ditransformasikan ke dalam rumusan yang lebih konkret sesuai dengan keanekaan lingkungan serta tingkat perkembangannya. Untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang dan lingkup kehidupan Bangsa Indonesia, nilai-nilai tersebut masih perlu dijabarkan ke dalam bentuk norma yang lebih operasional serta konkret. Norma yang dimaksud dapat berupa norma sopan santun, norma moral yang memberikan pedoman tindakan baik, maupun norma hukum. Berdasarkan norma-norma ini diharapkan Bangsa Indonesia telah memperoleh pedoman, arah serta rambu-rambu dalam perjalanan hidupnya untuk mencapai nilai-nilai luhur Pancasila tersebut.

Disamping aspek normatif, perwujudan Pancasila harus diusahakan dalam berbagai macam aspek lainnya, misalnya: aspek organisasi dan aspek semangat.

PANCASILA IDEOLOGI BANGSA INDONESIA

Perlu dibentuk lembaga-lembaga, baik lembaga kenegaraan maupun lembaga kemasyarakatan, serta diusahakan sistem serta kerjasama yang mendukung terwujudnya nilai-nilai Pancasila. Dan akhirnya perlu dibangun jiwa dan semangat Pancasila pada diri seluruh Bangsa Indonesia, karena yang merupakan subyek pelaksanaan Pancasila dalam segala segi kehidupan itu adalah manusia itu sendiri.

Ideologi Pancasila memuat nilai-nilai luhur manusiawi dan bukan nilai-nilai praktis saja, sehingga nilai-nilai tersebut dapat dioperasionalisasikan secara terus-menerus dalam menghadapi tantangan sejarah. Nilai-nilai tersebut akan tetap merupakan nilai yang wajib diusahakan oleh Bangsa Indonesia dalam perjalanan dan perkembangan hidupnya. Dalam langkah menjabarkan nilai-nilai Pancasila ke dalam nilai yang lebih konkrit dan operasional, serta dalam usaha mewujudkannya, janganlah sampai terjadi penyimpangan dan penyelewengan dari jiwa Pancasila. Dengan demikian penjabaran dan perwujudan nilai Pancasila itu harus tetap mewujudkan jiwa: religius, manusiawi, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Penjabaran nilai Pancasila serta perwujudannya harus tetap menghormati martabat manusia dengan segala dimensinya.

6. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas dapatlah kita buat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagaimana ditetapkan dalam Pembukaan UUD '45, Pancasila dapat kita fahami sebagai Ideologi Bangsa Indonesia dalam hidup menegara.
2. Ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang secara fleksibel dapat mengatur dan mengarahkan kehidupan Bangsa Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi bersangkutan.
3. Ideologi Pancasila dapat diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan Bangsa Indonesia, baik melalui aspek normatif, aspek organisatoris, maupun aspek semangat. Dalam perwujudannya, perlu mengingat kekhasan Ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Agar nilai-nilai Pancasila dapat terwujud dalam kehidupan Bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila harus selalu menjadi dasar dalam menentukan langkah perjalanan kehidupan Bangsa Indonesia. Meskipun kehidupan Bangsa Indonesia harus selalu berdasarkan nilai-nilai Pancasila, namun perwujudannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi bersangkutan, sehingga perwujudannya tetap menghormati martabat manusia. Dan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, kita harus mengusahakan melalui berbagai macam aspek, misalnya: aspek normatif, aspek organisatoris, maupun aspek semangat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sosronegoro, Herqutanto, dkk., 1984. *Beberapa Ideologi dan Implementasi Dalam Kehidupan Kenegaraan*, Yogyakarta : Liberty.
- Kelompok Studi Pancasila UNPAR Bandung, 1983. *Ideologi Pancasila adalah Ideologi Negara dan Bangsa Indonesia*.
- Kodhi, S.A., Soejadi, R., 1988. *Filsafat, Ideologi dan Wawasan Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Lanur, Alex, "Ideologi. Apa itu?", dalam *BASIS* edisi XXXIII, Februari, 1984.
- Magnis-Suseno, Franz., 1987. *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Yogyakarta: Gramedia.
- Mannheim, Karl, 1991. *Ideologi dan Utopia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Moedjanto, G., dkk., 1987. *Pancasila (Buku Panduan Mahasiswa)*, Jakarta: Gramedia.
- Notonagoro, 1987. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, cetakan ketujuh, Jakarta: Bina Aksara.
- Pranarka, AMW., 1983. *Sejarah Perkembangan Pemikiran tentang Pancasila sebagai Ideologi, Dasar Negara dan Sumber Hukum*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Poespowardojo, Soerjanto, 1989. *Filsafat Pancasila*, Jakarta: Gramedia.
- Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, 1981 *Bahan Penataran P4, UUD '45, GBHN*, Jakarta.
- BP-7 Propinsi DIY, *Suplemen Bahan Penataran bagi Para Penatar di Propinsi DIY*, Yogyakarta.